

PASUKAN BELA DIRI JEPANG JIEITAI

SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi persyaratan
memperoleh gelar
Sarjana Sastra**

Oleh :

**MOHAMAD MAULANA YUSUF
86111022**

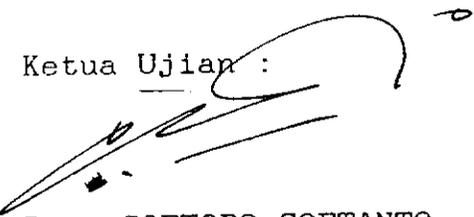


**FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS DARMA PERSADA
JAKARTA
1992**

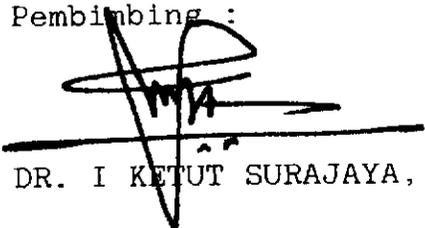
Skripsi ini telah diujikan pada hari kamis
tanggal 26 Maret 1992

PANITIA UJIAN

Ketua Ujian :


Drs. SOETOPO SOETANTO

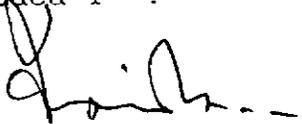
Pembimbing :


DR. I KETUT SURAJAYA, MA

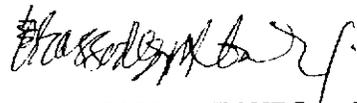
Sekretaris :


IRAWATI AGUSTINE, SS

Pembaca I :


JONNIE RASMADA HUTABARAT, MA

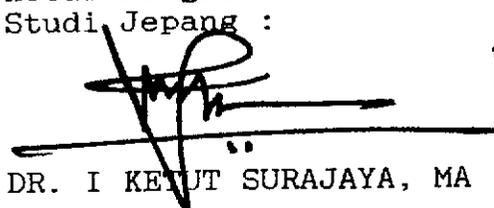
Pembaca II :


M. MOSSADEQ BAHRI, SS

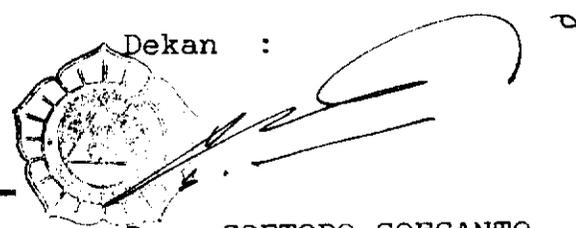
Disahkan pada hari
oleh :

tanggal

Ketua Program
Studi Jepang :


DR. I KETUT SURAJAYA, MA

Dekan :


Drs. SOETOPO SOESANTO

Seluruh isi skripsi ini sepenuhnya menjadi
tanggung jawab penulis

Jakarta, Pebruari 1992

Penulis,

MOHAMAD MAULANA YUSUF
NIM. 86111022

IKHTISAR

N a m a : Mohamad Maulana Yusuf
NIM : 86111022
Judul : Pasukan Bela Diri Jepang (*Jieitai*)
Pembimbing : DR. I Ketut Surajaya, MA.

Kawasan Asia Pasifik sejak dahulu telah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Perhatian tersebut dewasa ini kian bertambah kuat karena pertumbuhan ekonomi yang pesat di kawasan tersebut. Kemunculan Jepang sebagai raksasa negara industri, menjadi sorotan utama negara-negara di kawasan Asia Pasifik khususnya Asia Tenggara. Terlebih-lebih kemajuan yang dicapai dalam bidang kemiliterannya. Tindakan untuk meningkatkan kemampuan Pasukan Bela Diri sesuai dengan perkembangannya dilakukan oleh Jepang guna melindungi bangsa dan negara dari ancaman keamanan yang dilakukan oleh negara lain.

Pembentukan Pasukan Bela Diri Jepang serta rencana peningkatan anggaran pertahanan Jepang ternyata telah menimbulkan masalah. Masalah yang mendasar adalah penafsiran terhadap pasal 9 Undang-Undang Dasar yang baru. Perkembangan Pasukan Bela diri Jepang pada masa yang akan

datang tergantung kepada keadaan ekonomi dan politik Jepang, hubungan Jepang-Amerika serta perkembangan situasi internasional.

KATA PENGANTAR

Bismillaahir rahmaanir rahiim.

Puji syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga upaya dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang merupakan tugas akhir pada Fakultas Sastra Universitas Darma Persada Jakarta dapat terlaksana.

Terbukalah kini kesempatan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih serta penghormatan yang tulus ikhlas kepada :

1. Bapak DR. I Ketut Surajaya, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kel. H. AH Markum dan kel. Harsono Wiryosumarto, yang dengan tulus dan ikhlas memberikan dorongan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Drs. Soetopo Soesanto, Dekan Fakultas Sastra Universitas Darma Persada sebagai ketua Penguji.
4. Bapak Jonnie R. Hutabarat, MA dan Bapak M. Mossadeq Bahri, SS sebagai pembaca skripsi ini.
5. Staff pengajar Prog. Studi Bahasa dan Sastra Jepang yang telah memberikan pengetahuan yang tidak terhingga dari semester pertama hingga semester akhir, sehingga memungkinkan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kakak-kakak dan adik-adik saya yang telah memberikan perhatian dan semangat dalam penulisan ini.

7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Allah SWT jualah yang akan membalas budi baik yang diberikan.

Khusus kepada Alm. kedua orang tua saya, ingin saya persembahkan rasa hormat dan haru yang mendalam atas semua bimbingan yang pernah diberikan. Tiada kata-kata yang cukup baik yang dapat saya temukan untuk mengungkapkan rasa terimakasih ini. Sekilas terbayang wajah ayahanda dan ibunda tercinta. Semoga terpenuhilah keinginan ayahanda dan ibunda dengan persembahan ananda yang jauh dari sempurna ini.

Akhirul kalam semoga Allah SWT yang maha kuasa senantiasa melimpahkan taufiq dan hidayahNya serta memberikan bimbingan dan petunjukNya dalam segala upaya yang kita lakukan.

Jakarta, Pebruari 1992

Penulis

DAFTAR ISI

halaman

KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Masalah	10
3. Metode Penelitian	12
4. Sistematika Penulisan	12
BAB II	
PEMBENTUKAN PASUKAN BELA DIRI JEPANG	14
1. Mempersenjatai Jepang Kembali	14
2. Sistem Pengawasan Pasukan Bela Diri Jepang	18
3. Fungsi dan Peranan Pasukan Bela Diri Jepang	20
4. Pasukan Bela Diri Jepang	23
4.1. Pasukan Bela Diri Darat	23
4.2. Pasukan Bela Diri Laut	25
4.3. Pasukan Bela Diri Udara	26
5. Meningkatkan Anggaran Pertahanan	27
6. Pengamanan Jalur Pelayaran Bahan Ekspor-Import	29
BAB III	
KEBIJAKSANAAN DASAR PERTAHANAN NASIONAL	32
1. Makna Pertahanan	32
2. Kebijakan Dasar Pertahanan Jepang	36
3. Garis Besar Pertahanan Nasional	38
4. Konsep Dasar Pertahanan	40
4.1. Pencegahan Terhadap Serangan Bersenjata	40
4.2. Membalas Serangan Bersenjata	40
5. Kemampuan Pertahanan yang Harus Dimiliki oleh Jepang	41
6. Kemampuan Pertahanan Jepang	42
7. Kebijakan Dasar Dalam Membangun Kemampuan Pertahanan	44
8. Industri Pertahanan	45

BAB IV

PASUKAN BELA DIRI JEPANG DAN MASALAHNYA	47
1. Kebijakan Nasional Terhadap Pertahanan	47
2. Arti Fasilitas Pertahanan	50
3. Langkah Menuju Terciptanya Keserasian Antara Fasilitas Pertahanan dengan Lingkungan Sekitar	52
3.1. Ganti Rugi Terhadap Gangguan yang Ada	54
3.2. Pencegahan Terhadap Polusi Suara	54
3.3. Sumbangan Perbaikan di Wilayah yang Bertetangga	55
4. Interaksi Terhadap Masyarakat	57
5. Tanggapan Negara-Negara Tetangga	58

BAB V

KESIMPULAN	61
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	69
DAFTAR ISTILAH	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.	



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Keberadaan suatu bangsa tidak lepas dari adanya peranan angkatan bersenjata. Kehadiran suatu angkatan bersenjata sangat dibutuhkan dalam mengawasi kedaulatan negara dari ancaman luar, juga untuk menjaga stabilitas dalam negeri. Namun kadang kala kehadiran angkatan bersenjata yang berlebihan dapat menimbulkan berbagai masalah. Masalah yang timbul dalam negeri mengenai keberadaan angkatan bersenjata yang berlebihan adalah apabila angkatan bersenjata mengadakan campur tangan di dalam pemerintahan, sehingga lambat laun negara tersebut dapat menjadi negara militer sedang masalah yang lainnya adalah muncul-

nya persaingan dalam bidang kemiliteran dengan negara-negara tetangga disertai dengan rasa kecurigaan yang besar. Demikian pula Jepang adalah negara yang memiliki pengalaman dibidang kemiliteran jauh. sebelum abad 14, dengan adanya latar belakang semangat kemiliteran yang dimiliki oleh para *Samurai*. Semangat tersebut dikenal dengan nama *Bushido*. Kiprah kaum militer Jepang sampai berakhirnya Perang Pasifik, menunjukkan bahwa tradisi militer dalam masyarakat Jepang cukup kuat.

Sejarah militer Jepang yang panjang itu sangat unik. Pada awal pembentukannya menghadapi berbagai masalah. Mulai dengan berakhirnya masa kejayaan Keshogunan *Tokugawa (Iemochi)*, yang terpaksa membuka kembali Jepang berhubungan dengan dunia luar setelah menjalankan politik isolasi yang dimulai tahun 1639. Hubungan dengan luar, ditandai dengan kehadiran armada perang Amerika di bawah pimpinan Komodor *Matthew Calbraith Perry*, tahun 1853 dan 1854. Pada tahun 1854 dibuat perjanjian persahabatan antar kedua negara, yang dikenal dengan nama *Nichibei Washin Joyaku* (perjanjian persahabatan Jepang-Amerika). Kemudian tiga tahun setelah itu ditandatangani lagi satu perjanjian persahabatan dan perniagaan yang telah diperbaharui, dikenal dengan nama *Nichibei Tsujo Joyaku*. Awal proses pembukaan negeri ini di satu pihak ada yang mendu-

kung, namun ada pula pihak yang menolak, misalnya kelompok *Kobugatai* yakni kelompok yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional bangsa Jepang yang tinggi dan menolak pengaruh dari nilai-nilai luar.

Di lain sisi yang menjadi pemikiran para pemimpin pemerintahan *Meiji*, adalah masalah pertahanan keamanan nasional. Dengan dibukanya kembali Jepang berhubungan dengan dunia luar secara mendadak dan dengan tidak adanya kesiapan dari pihak Keshogunan dalam bidang kemiliteran, mengakibatkan Jepang berada dalam posisi yang mudah untuk dikuasai oleh kekuatan asing manapun. Oleh sebab itu masalah pertahanan keamanan nasional Jepang harus diperhitungkan dengan seksama, apakah sekiranya mengambil model dari barat atau tetap dengan gaya tradisi kunonya. Walau pun dibutuhkan sebuah kekuatan pertahanan nasional yang kuat, sebuah kesatuan militer tidak dapat dengan segera dibentuk. Pemerintah terpaksa memanfaatkan pasukan-pasukan dari berbagai lapisan dan daerah untuk menjadi satu-satunya kekuatan yang tersedia, meskipun mereka tidak terlalu efektif. Reorganisasi umum dari pemerintah yang berlaku mulai awal tahun 1868, membentuk sebuah Badan Pertahanan Militer yang bertugas mengambil alih garnisun-garnisun yang ada di seluruh negeri. Pemerintah membentuk sebuah garnisun yang terdiri dari

pada *Samurai* yang harus disediakan oleh para tuan tanah dari setiap pendapatan daerah yang mencapai 10.000 *Koku*. Para tuan tanah tersebut wajib menyumbangkan 10 pasukan tetapnya untuk ditugaskan di Ibukota dan 50 pasukan cadangan yang berada di daerahnya. Mereka juga diharuskan menyediakan 300 *Ryo* untuk keperluan militer.¹⁾ Suatu hal yang terpenting dalam sebuah organisasi kemiliteran adalah dibutuhkannya kesatuan, seperti tercermin pada setiap daerah yang telah memiliki sendiri sistem organisasi dan pelatihannya yang mencontoh dari sistem Perancis, Inggris dan Belanda. Pada waktu Departemen Kemiliteran terbentuk pada musim panas tahun 1869, Wakil Menteri Departemen tersebut *Omura Masujiro*, meniru sistem Perancis sebagai model militer Jepang dan mendirikan Sekolah Militer serta menghapuskan kelas *Samurai* (peraturan ini dikenal dengan nama *Shimin Byodo*), dan sistem pengerahan lembaga tersebut diperoleh dari berbagai lapisan masyarakat yang ada. Namun saat Sekolah Militer itu memulai kegiatannya, *Omura Matsujiro* terbunuh, kemudian cita-citanya diteruskan oleh *Yamagata Aritomo*.²⁾

Yamagata Aritomo kembali dari Eropa musim panas

¹⁾ Chitoshi Yanaqa, *Japan Since Perry, Chapter 6 A New National Defense Structure*, hal. 112-113, Tahun 1975.

²⁾ *Ibid.*

tahun 1870, setelah memperdalam sistem militer Perancis dan Prussia. Pada saat ia menjabat sebagai Wakil Menteri dalam Departemen Kemiliteran, ia menyadari kondisinya yang sangat penting dalam membawa persatuan di tubuh militer. *Yamagata* memulai programnya dengan beberapa perubahan. Walaupun *Yamagata* pengagum sistem militer Jerman namun ia tidak memaksakan pandangannya terhadap Badan Pemerintah. Musim gugur tahun 1870 Badan Pemerintah tidak menyetujui rekomendasi *Yamagata* terhadap pemilihan tentara Perancis sebagai model bagi tentara Jepang dan organisasi Angkatan Lautnya sesuai dengan Inggris.

Tahun 1871 terbentuk *Goshimpei* sebuah organisasi kemiliteran yang didirikan oleh *Saigo Takamori*, yang kemudian menjadi Pasukan Pengawal Kaisar. Dua bulan kemudian terbentuk dua buah garnisun, yang satu di Timur dan satu di Barat. Pada musim panas tahun yang sama garnisun itu bertambah menjadi empat dan kepada seluruh pasukan yang ada di seluruh negeri selain garnisun-garnisun yang baru terbentuk ini diperintahkan untuk membubarkan diri, bahkan banyak diantaranya yang bergabung dengan garnisun-garnisun yang baru terbentuk tersebut. Semua ini sebagai langkah awal dari terbentuknya 20 batalyon yang terdiri dari empat garnisun pengawal Kaisar. Walaupun demikian hal ini masih kurang untuk mencukupi

kebutuhan militer dan Pertahanan Keamanan Nasional.

Di bawah organisasi baru yang merupakan realisasi dari ide *Yamagata*, kekuatan Militer Nasional terdiri dari tiga komponen; yaitu Pasukan Tetap, Pasukan Cadangan dan Tentara Nasional. Pemerintah pun menjalankan Undang-Undang wajib militer (*Choheirei*), kepada setiap laki-laki yang berbadan sehat berumur 20 tahun dengan masa ikatan dinas selama tiga tahun, empat tahun lagi sebagai cadangan dan bertanggung jawab terhadap militer sampai usia 50 tahun. Namun ada pengecualiannya dari pelaksanaan Undang-Undang wajib militer tersebut terutama terhadap; kepala keluarga, pegawai pemerintah, anak tunggal, cucu tunggal, golongan bangsawan dan siapa saja yang dapat membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan, dapat dibebaskan dari *Choheirei* tersebut. Tentu saja pengecualian ini banyak menimbulkan ketidakpuasan masyarakat sehingga pengecualian ini akhirnya dihapuskan.

*Di bawah sistem ini pihak militer menghentikan pula hak istimewa yang dimiliki oleh para *Samurai*, dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang di mana pun dan dari golongan manapun untuk mengikuti *Choheirei*. Hal ini tidak begitu disukai oleh kaum *Samurai* yang merasa urusan dan tanggung jawabnya dicampuri serta hak-hak istimewa mereka

yang diperolehnya sejak dahulu dihapus begitu saja. Dari pihak petani pun mereka kurang menyukai karena menurut anggapan mereka tenaga dan waktu mereka lebih dibutuhkan di tanah-tanah pertanian. Untuk menghadapi masalah tersebut langkah yang diambil oleh pemerintah adalah kampanye besar-besaran mengenai perbaikan dibidang pendidikan dan memasukan unsur-unsur penyuluhan perlunya *Choheirei*, guna Pertahanan Keamanan Nasional. Percobaan untuk satuan *Choheirei* adalah menghadapi pemberontakan *Eto Shimpei* di *Saga* dan pemberontakan di daerah *Satsuma* yang dipimpin oleh *Saigo Takamori*. Bulan September tahun 1877, pemberontakan-pemberontakan tersebut dapat diatasi oleh satuan *Choheirei*. Dua buah klan yang menjadi unsur terpenting dalam tubuh kemiliteran Jepang adalah klan *Chosu* untuk Angkatan Darat dan klan *Satsuma* untuk Angkatan Laut.

Sejarah militer Jepang terus berlanjut dengan keikut sertaannya dalam kancah Perang Pasifik. Sebelum pecah Perang Dunia II militer Jepang menguasai Korea dan semua kepulauannya, kemudian muncul masalah kelebihan penduduk dan kekurangan sumber daya alam yang mengakibatkan Jepang menginginkan terciptanya suatu Kawasan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya (*Dai Toa Kyo-eiken*). Caranya ialah dengan menghancurkan sistem kolonial Barat di Asia

Timur dan Asia Tenggara. Hal ini mendapat tentangan yang keras dari negara-negara Barat, khususnya yang memiliki daerah koloni di Asia Timur dan Asia Tenggara. Jepang dengan tegas menolak untuk memenuhi persyaratan utama perdamaian yang diajukan pihak Barat seperti penarikan mundur semua pasukan Kerajaan Jepang dari Cina dan Indocina. Puncak dari tindakan militer Jepang adalah melakukan serangan mendadak terhadap pangkalan laut Amerika "Pearl Harbour" di Hawaii tanggal 7 Desember 1941, peristiwa ini merupakan awal dari pecahnya Perang Pasifik. Hanya dibutuhkan waktu sekitar enam bulan untuk mengibarkan Hinomaru antara Lashio di Birma sampai kepulauan Wake di Pasifik Tengah. Kejayaan militer Jepang pada saat itu benar-benar berada pada posisi puncak. Ini membuat pihak Sekutu harus memeras otak untuk menemukan jalan terbaik untuk menghentikan gerak maju militer Jepang di kawasan Asia Pasifik. Langkah akhir yang diambil oleh pihak Sekutu adalah dengan menjatuhkan bom atom di dua kota, Hiroshima dan Nagasaki sebagai ultimatum pihak Sekutu. Dengan jatuhnya bom atom di dua kota tersebut mengakibatkan berakhirnya masa kejayaan militer Jepang. Selanjutnya Jepang sebagai negara yang kalah perang diduduki oleh Amerika.

Selama masa pendudukan dan setelahnya bangsa Jepang

dilarang untuk memiliki suatu Angkatan Bersenjata dan mengajukan mereka-mereka yang bertanggung jawab atas tindakan militer Jepang selama Perang Pasifik ke Mahkamah Militer Internasional Timur Jauh (*Kyokuto Kokusai Gunji Saibansho*), sebagai penjahat perang. Pihak Sekutu juga merubah Undang-Undang Dasar *Meiji* dengan Undang-Undang Dasar yang baru, yang dikenal dengan nama *Nihon Koku kenpo*. Dalam Undang-Undang ini diterapkan sistem demokrasi, diberlakukan persamaan hak antara wanita dan laki-laki, dilindunginya serikat buruh dan hak asasi manusia serta diperbaharuinya sistem peradilan, pendidikan dan perekonomian. Jaminan kebebasan dalam berpolitik menyebabkan kebangkitan partai-partai politik.

Di bidang pertahanan dibentuklah Badan Pertahanan Nasional. Badan tersebut mendapat tugas untuk membangun kembali keberadaan angkatan bersenjata, yang kelak disebut dengan nama Pasukan Bela Diri Jepang (*Jieitai*). Ketika pecah Perang Korea bulan Juni tahun 1950, di Jepang terjadi kekosongan militer karena militer Amerika yang berada di pangkalan pertahanan Jepang dikirim ke Korea Selatan. Untuk menggantikan militer Amerika ini dibentuk Kesatuan Polisi Nasional Cadangan pada awal musim panas tahun 1950

dengan jumlah personil sekitar 75.000 orang.³⁾

Tujuan utama dari Pemerintah Pendudukan Amerika adalah memandang jauh ke depan, dimana menurut mereka perlunya memelihara inti dari Tentara Kerajaan Jepang yang telah dilumpuhkan dalam Perang Pasifik, guna selanjutnya mengembangkan menjadi suatu angkatan bersenjata baru yang sudah tentu bersedia untuk membela kepentingan-kepentingan Amerika di kawasan Asia Pasifik kelak.

2. Masalah

Sebagian besar negara-negara di kawasan Asia Pasifik memiliki sumber-sumber alam yang cukup potensial. Kawasan ini mempunyai potensi yang besar untuk mengambil peranan dalam kehidupan bangsa-bangsa di dunia. Lalu muncullah Jepang yang kemudian diikuti oleh Korea Selatan, Taiwan, Hongkong dan Singapura sebagai kekuatan ekonomi dunia baru. Negara-negara selain Jepang tersebut dikenal sebagai "The New Industrial Countries".

Kemunculan Jepang sebagai raksasa negara industri, menjadi sorotan utama negara-negara di kawasan Asia Pasi

³⁾ Di. I ketut Surajaya, MA "Pasukan Bela Diri Jepang dan Nasalannya" hal. 3-7. Kompas, 29 Maret 1983.

fik dan Asia Tenggara, terlebih-lebih kemajuan yang dicapai dalam bidang kemiliterannya. Dilihat dari kekuatan daya tempur, mobilitas perlengkapan teknik, maupun sejumlah kemampuan lainnya, militer Jepang yang disebut "Pasukan Bela Diri" sudah lama melampaui tingkat kekuatan Tentara Kerajaan menjelang pecah Perang Pasifik. Faktor kekuatan militer yang dimiliki oleh Jepang inilah di kawasan Asia Tenggara merupakan satu masalah yang serius. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mengkhawatirkan dipergunakannya kembali kekuatan militer Jepang kelak dalam memaksakan kehendaknya, mengingat pengalaman buruk Perang Pasifik.

Masalah lainnya adalah pembentukan Pasukan Bela Diri itu sendiri serta eksistensinya dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Jepang serta menimbulkan rasa tidak senang bagi sebahagian rakyat Jepang. Hal ini tidaklah aneh, mengingat Undang-Undang Dasar Jepang tersebut sebenarnya dipaksakan oleh pihak Amerika yang sudah berulang kali membuktikan ketidak mampuan orang Amerika dalam hal memahami kepentingan orang Jepang. Kemudian masalah yang dihadapi oleh Pasukan Bela Diri Jepang seperti rencana peningkatan anggaran pertahanan, penjagaan jalur pelayaran yang penting bagi kebutuhan barang-barang ekspor-impor, serta ancaman keamanan yang mungkin berasal dari Uni Sovyet dan Cina.

Untuk mengatasi larangan membentuk angkatan bersenjata, kalangan yang berkuasa di Jepang menggunakan istilah yang disebut "Taktik Perubahan Kecil". Tiap tahun dengan meningkatkan anggaran untuk keperluan militer dan melengkapi tentara dengan persenjataan yang pada mulanya bersifat defensif tapi kemudian menjadi ofensif.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, adalah metode penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisis dengan metode pendekatan historis. Buku yang digunakan antara lain *Nihon Kokuseizue*, *Boei Hakusho*, *The Militarist*, *The Rise of Japanese Militarism Since WW II*, *Japan Since Perry*, dan *Defense of Japan*. serta beberapa artikel dari surat kabar yang berkaitan dengan militer Jepang.

4. Sistematika Penulisan

Dalam Bab I penulis menjelaskan latar belakang dan sejarah terbentuknya Angkatan Bersenjata Jepang modern, dengan periode waktu dari pembukaan negeri setelah menjalankan politik isolasi hingga berakhirnya Perang Dunia II.

Dalam Bab II penulis mencoba memulai dari latar belakang pembentukan Pasukan Bela Diri Jepang, apa tujuan utamanya, bagaimana dengan sistem pengawasannya, unsur-unsur yang terdapat dalam Pasukan Bela Diri Jepang. Juga diuraikan beberapa masalah menyangkut peningkatan anggaran pertahanan dan jalur pengamanan pelayaran bahan impor.

Dalam Bab III penulis membahas garis-garis besar program Pertahanan Nasional, apa dasar kebijaksanaan yang diambil dalam pembentukan kemampuan pertahanan serta hubungannya dengan industri pertahanan.

Dalam Bab IV penulis membahas mengenai tanggapan dan reaksi terbentuknya Pasukan Bela Diri Jepang, baik tanggapan dari masyarakat Jepang sendiri maupun tanggapan negara-negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Dalam Bab V merupakan kesimpulan penulis. yaitu kesimpulan yang diambil dari setiap bab yang telah diuraikan sebelumnya. Sehingga penulis harapkan membawa kejelasan bagi pembaca.